

# JURNAL PROMOTIF PREVENTIF

## Pengelolaan Kawasan Permukiman Suku Bajo di Desa Balimu Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton

### Management of the Bajo Tribe Settlement Area in Balimu Village, South Lasalimu District, Buton Regency

Abdul Majid<sup>1</sup>, Wa Ode Arsyiah<sup>1</sup>, Laode Muhammad Arsal<sup>2</sup>, Jasir B<sup>1</sup>, Novalia Safitri<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP, Universitas Dayanu Ikhsanuddin Baubau, Indonesia

<sup>2</sup> Program Studi Sosiologi, FISIP Universitas Dayanu Ikhsanuddin Baubau, Indonesia

#### Article Info

##### Article History

Received: 19 Mei 2024

Revised: 10 Jun 2024

Accepted: 18 Jun 2024

#### ABSTRACT / ABSTRAK

*Changes in the Bajo tribe's residential area in Balimu Village have the impact of continuous sea filling to change the shape of their residential area. Marine landfilling using coral stones or other types of piled rock can disrupt the marine ecosystem. This research aims to describe the Management of Bajo Tribe Settlement Areas in Balimu Village, South Lasalimu District, Buton Regency. This research uses a qualitative descriptive research method with data collection techniques through observation, interviews and documentation. The data analysis used is data collection, data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of this research show that the management of residential areas in Balimu village has damaged the surrounding ecosystem, such as damage to mangrove forest areas due to continuous landfilling. Several locations in the settlement look slum due to the lack of rubbish storage, so the Balimu village community disposes of rubbish freely into the sea. In its management efforts, the village government always involves participation from the community so that there is openness and clarity in activities within the village. And there is no use for processing waste so that the amount of waste thrown into the sea can be reduced.*

**Keywords:** management, residential area, Bajo tribe

Perubahan kawasan permukiman suku bajo di Desa Balimu berdampak pada penimbunan laut secara terus-menerus untuk merubah bentuk kawasan permukiman mereka. Penimbunan laut tersebut menggunakan batu-batu karang maupun jenis batu timbunan dapat menimbulkan ekosistem laut menjadi terganggu. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Pengelolaan Kawasan Permukiman Suku Bajo Di Desa Balimu Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengelolaan kawasan permukiman di desa Balimu telah merusak ekosistem disekitarnya seperti kerusakan terhadap kawasan hutan mangrove akibat adanya penimbunan yang dilakukan secara terus- menerus. Beberapa lokasi didalam permukiman terlihat kumuh akibat tidak adanya tempat penampungan sampah sehingga masyarakat desa Balimu melakukan pembuangan sampah secara bebas kelaut. Dalam upaya pengelolaanya pemerintah desa selalu melibatkan partisipasi dari masyarakat agar adanya keterbukaan dan kejelasan dalam kegiatan didalam desa. Serta belum adanya pemanfaatan untuk mengolah sampah agar jumlah sampah yang dibuang kelaut dapat berkurang.

**Kata kunci:** pengelolaan, kawasan permukiman, suku bajo

#### Corresponding Author:

Name : Abdul Majid

Affiliate : Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP, Universitas Dayanu Ikhsanuddin Baubau, Indonesia

Address : Jl. Yos Sudarso No.43, Wale, Kec. Wolio, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara 93711

Email : abdulmajid@unidayan.ac.id

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang terletak di antara samudera Hindia dan Pasifik serta benua Asia dan Australia yang memiliki keanekaragaman budaya berupa suku, kebudayaan, dan bahasa yang tinggi, serta kekayaan akan Sumber Daya Alam (Capalulu, dkk, 2016). Paradigma masyarakat Indonesia dalam perkembangan permukiman sebagian besar masih berorientasi pada daratan, karena orientasi pembangunan kewilayah daratan (Landward Oriented development). Wilayah daratan dan wilayah lautan (perairan) terkait sangat erat menjadi padu (menyatu) dalam fungsi spasialnya membentuk kawasan-kawasan pantai dan perairan (marine and coastal zones). Daerah pesisir pantai mempunyai peran penting dalam perekonomian masyarakat dan pembangunan khususnya bagi masyarakat suku bado. Asal usul suku bado, terdapat banyak versi diantaranya yang pertama suku bado merupakan suku laut yang berasal dari Johor Malaysia yang kemudian menyebar hingga ke Sulawesi, NTT, Sulawesi Tenggara dan pulau-pulau sekitar di Indonesia (Nurkholis, 2018).

Di Indonesia sendiri komunitas permukiman suku bado cukup banyak dijumpai, salah satu tempat penyebarannya terdapat di desa Balimu, kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Desa Balimu Kabupaten Buton terletak di Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton adalah sebuah desa yang di huni oleh Kebanyakan suku Bado. Desa Balimu dengan penduduk mayoritas Suku Bado ini memiliki keunikan seperti suku Bado yang tersebar di Indonesia yaitu dikenal sebagai nelayan tradisional yang terampil dan hidupnya tergantung sepenuhnya pada laut suku bado juga dikenal sebagai pengembara laut dan hidup diatas perahu yang berfungsi juga sebagai hunian.

Luas Desa Balimu 2 Ha dari laut pemukiman dengan jumlah penduduk yang tercatat pada data kampungkb.bkkbn.go.id sebanyak 236 KK atau 850 jiwa yang tersebar di Desa Balimu Kabupaten Buton. Penduduk suku bado di Desa Balimu yang sebelumnya hidup diatas perahu yang berfungsi juga sebagai hunian mulai bertransformasi menjadi pemukiman dikawasan pesisir Desa Balimu. Kawasan pemukiman suku Bado terus berkembang sejalan dengan meningkatnya penduduk yang bermukim yang sangat dekat dengan potensi sumberdaya alam yang bernilai ekonomi namun kawasan pemukiman suku Bado yang berdampak pada rusaknya ekosistem laut di sekitar. Maraknya penimbunan laut untuk mendirikan rumah-rumah beton menjadi salah satu fenomena yang cukup mengkhawatirkan tidak hanya bagi keberlangsungan ekosistem laut tetapi berimplikasi pada kearifan local yang menjadi salah satu ciri khas masyarakat suku Bado.

Berdasarkan fakta empiris diatas, maka dianggap penting untuk memberikan gambaran secara deskriptif mengenai pengelolaan kawasan pemukiman suku bado di Desa Balimu Kabupaten Buton sebagai salah satu alternative yang dapat dioptimalkan oleh Pemerintah dalam rangka menanggulangi masalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan kawasan pemukiman suku bado guna upaya pelestarian alam dan budaya di Desa Balimu Kabupaten Buton.

## BAHAN DAN METODE

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai suatu gejala atau fenomena-fenomena dengan menggunakan logika ilmiah berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan.

Bogdan dan Taylor dalam Lexy J. Moleong (2011), menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data dan deskriptif berupa informasi tertulis dan lisan dari seseorang dan perilaku dapat diamati. Sumber data berasal dari data primer dan data sekunder Lofland (Moleong, 2011) yaitu pertama data primer (data pokok) data yang diperoleh langsung dari orang yang ditetapkan sebagai informan yang akan diajak wawancara, data yang di maksud berupa pendapat, prespsi dan anggapan tentang berbagai faktor yang ada kaitannya langsung dengan penelitian ini yaitu data-data mengenai pengelolaan Kawasan Permukiman Suku Bajo di Desa Balimu Kabupaten Buton. Kedua data sekunder (data pendukung) data yang diperoleh secara tidak langsung dengan cara mengutip data dari buku, jurnal, dokumen yang berupa arsip-arsip, laporan hasil, surat keputusan serta aturan-aturan yang berkaitan atau relevan dengan judul penelitian penulis. Disamping itu peneliti melakukan teknik pengeumpulan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi dan melakukan analisis data berupa pengumpulan data, reduksi data, penyajian data hingga penarikan kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Suku Bajo Desa Balimu Kabupaten Buton**

Suku Bajo adalah salah satu suku nomaden yang hidup di laut yang dikenal juga sebagai suku laut, mereka menggantungkan hidupnya dari laut dan memiliki kehidupan yang tak pernah jauh dari laut, identik dengan perahu, dan permukiman di atas air laut sebab dahulu mereka hanya tinggal di atas perahu dan mengembara/hidup berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Kebiasaan hidup suku bajo berpindah tergantikan dengan budaya bermukim menetap dengan membangun rumah di atas perairan/laut dangkal. Perubahan pola hidup orang Bajo dari laut untuk kemudian menetap dan membuat permukiman di suatu tempat, menyebabkan mereka mengalami perubahan nilai-nilai sosial yang dianut. Menurut Suyuti (2011), mengungkapkan bahwa perubahan konsep permukiman dari kehidupan di laut lepas kemudian tinggal di suatu tempat/daratan merupakan usaha untuk menjustifikasi kehidupan laut dan darat melalui suatu perspektif adaptasi dengan menempatkan perubahan budaya sebagai bagian dari usahanya untuk beradaptasi terhadap lingkungannya. Saat ini permukiman Suku Bajo di beberapa perairan Indonesia salah satunya Di Kabupaten Buton Desa Balimu.

Sebelum Desa Balimu terbentuk menjadi salah satu desa, awalnya masih bergabung dengan Desa Lasalimu, dengan demikian masih berstatus dusun dengan nama Dusun Balimu. Seiring dengan perkembangan zaman pada tahun 2011 Dusun Balimu resmi menjadi desa tersendiri dengan nama Desa Balimu yang diresmikan pada tanggal 05 juli 2011.

Desa Balimu merupakan salah satu desa dari 16 (enam belas) desa yang ada di Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton. Secara geografis posisi Desa Balimu berbatasan dengan Kabupaten Buton Utara di sebelah utara berbatasan, sebelah timur berbatasan dengan Laut Flores, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Lasalimu Kec. Lasalimu dan sebelah barat berbatasan dengan: Desa Wasambaa Kec. Lasalimu.

### **Pengelolaan Kawasan Permukiman Suku Bajo di Desa Balimu Kabupaten Buton**

Kawasan pada Lingkungan suku Bajo di Desa Balimu kini terdiri dari hunian di atas genangan air merupakan kawasan yang masih terpengaruh oleh prinsip kearifan lokal suku

Bajo, berdasarkan hasil observasi di lapangan hunian yang berada pada genangan air dengan karakteristik bangunan merupakan rumah kayu terapung dan beberapa kawasan dengan bentuk bangunan berbeton.

Peningkatan pemukiman penduduk suku bajo yang kini berpengaruh pada kualitas lingkungan permukiman Suku Bajo pada daerah peralihan antara permukiman yang terkena dampak sedimentasi dan daerah yang terkena dampak reklamasi. reklamasi dilakukan oleh warga di Lingkungan Bajo sendiri, sehingga daratan yang terjadi menjadi tidak datar dan disertai pembangunan jalan yang tidak memperhitungkan sirkulasi air laut.

Pengelolaan merupakan kegiatan pemanfaatan dan pengendalian atas semua sumber daya yang diperlukan untuk mencapai ataupun menyelesaikan tujuan. Pengelolaan kawasan permukiman suku Bajo di Desa Balimu Kabupaten Buton berdasarkan teori pengelolaan yang dikemukakan George R. Terry (2006), pengelolaan dimaknai sebagai pemanfaatan sumber daya manusia ataupun sumber daya lainnya yang dapat diwujudkan melalui kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

### **Tahap Perencanaan (*Planning*)**

Perencanaan adalah pemilihan serangkaian kegiatan dan keputusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana dan oleh siapa (Usman Effendi, 2014). Perencanaan merupakan langkah awal yang harus dilakukan kaitanya dalam memikirkan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dicapai kedepannya (Rifaldi Dwi Syahputra dan Nuri Aslami, 2023). Menurut George R. Terry (2006) "Perencanaan adalah memilih fakta dan penghubungan fakta - fakta serta pembuatan dan penggunaan perkiraan - perkiraan atau asumsi - asumsi untuk masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan - kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan" (Suproati, 2017). Terkait dengan pelaksanaan pada proses perencanaan setidaknya memenuhi 3 indikator. Yang *pertama*, adanya serangkaian kegiatan yang dilakukan. *Kedua*, waktu pengelolaan dilakukan dan yang *ketiga*, bagaimana dan siapa yang melakukan pengelolaan tersebut.

Sebagaimana yang dinyatakan oleh Tjokroamidjodjo (1986), bahwa perencanaan merupakan hal yang penting, karena terdapatnya suatu pengarahan dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan. Selain itu melalui perencanaan yang baik dapat disusun suatu prioritas, sehingga sumber daya yang dimiliki dapat dikelola dengan baik, tujuan yang diinginkan dapat tercapai dan memperoleh manfaat yang optimal.

Proses pengelolaan Desa Balimu yang dinamis dan berjalan secara terus menerus, dalam pemanfaatan dan pembangunan. Bagian penting dalam pengelolaan kawasan permukiman suku Bajo Desa Balimu secara terpadu dilakukan melalui dua pendekatan yaitu, yang bersifat struktural dan non structural. Pendekatan structural yang dilakukan ditekankan pada penataan sistem dan struktur sosial politik. Pendekatan ini mengutamakan peranan instansi yang berwenang atau organisasi yang telah terbentuk untuk pengelolaan Desa Balimu yaitu Pemerintahan Desa Balimu. Dalam hal ini peranan masyarakat sangat penting dan cukup mendominasi namun kurang kuat karena aspek struktural biasanya lebih efektif bila dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai kewenangan, paling tidak pada tahap awal. Dilain pihak pendekatan non structural adalah pendekatan yang subyektif. Pendekatan ini mengutamakan pemberdayaan masyarakat secara mental dalam rangka meningkatkan

kemampuan anggota masyarakat untuk ikut serta dalam pengelolaan dan persoalan pengelolaan kawasan pemukiman suku bajo Desa Balimu.

Berdasarkan hasil wawancara bersama pemerintah desa terkait proses perencanaan kawasan pemukiman suku bajo Desa Balimu dimana serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan kawasan suku bajo di desa Balimu, pemerintah desa mengupayakan untuk melakukan penimbunan laut secara menyeluruh dan merata di kawasan permukiman agar dapat mempermudah aktivitas masyarakat beberapa kegiatan pengelolaan yang sudah dilakukan seperti membuat jalan setapak, dermaga, jembatan upaya ini dilakukan agar akses jalan di dalam desa lebih mudah untuk dijangkau masyarakat selain itu aktivitas penimbunan laut diharapkan dapat memperkuat landasan/tumpuan rumah-rumah masyarakat di desa Balimu. Kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan di desa seperti melakukan penimbunan untuk membangun jalan didalam desa agar masyarakat semakin mudah untuk beraktivitas sehari-hari.

Sama halnya dengan pemerintah desa, upaya penimbunan juga dilakukan oleh masyarakat suku bajo di desa Balimu. Alasan penimbunan cukup beragam, mulai dari pemenuhan akses jalan sampai dengan keinginan masyarakat untuk mendirikan rumah semi permanen. Maraknya proses penimbunan ini tentunya berimplikasi pada lingkungan, mulai dari terganggunya ekosistem hewan laut sampai dengan rusaknya ekosistem daru hutan mangrove yang berada di kawasan pemukiman. Hanya saja yang disayangkan oleh peneliti, kerusakan yang terjadi akibat penimbunan tersebut tidak di anggap sebagai permasalahan yang serius sehingga praktek-praktek penimbunan masi terus dilakukan baik itu dari pemerintah desa maupun dari masyarakat itu sendiri.

Terkait dengan indikator yang *kedua*, pengelolaan desa mengenai waktu dilakukanya pengelolaan, dimana pengelolaan ini tlah dilakukan sejak adanya pemekaran desa tepatnya pada tahun 2011. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti dilapangan, bahwa kegiatan pengelolaan yang terdapat didalam desa mulai dilakukan sejak desa Balimu mengalami pemekaran, sejak pemekaran hingga saat ini desa Balimu sudah mengalami banyak perubahan secara signifikan seperti kondisi desa suku bajo yang sudah hampir mirip dengan kondisi desa didarat karena adanya penimbunan dengan adanya kegiatan-kegiatan pengelolaan yang ada menjadikan desa Balimu mengalami perkembangan dari waktu ke waktu namun meskipun demikian kegiatan yang dilakukan sejauh ini juga turut merusak kondisi disekitar desa seperti kerusakan pada ekosistem hutan mangrove.

Pada indikator *ketiga*, peneliti menemukan bahwa pengelolaan didesa Balimu dilakukan dengan cara melibatkan partisipasi dari masyarakat dalam setiap kegiatan-kegiatan pengelolaan seperti pembangunan akses jalan didalam desa, pembangunan tambatan perahu masyarakat, dan beberapa sarana prasarana desa keterlibatan masyarakat tentu dibutuhkan oleh pemerintah desa agar bersama-sama dalam membangun desa namun dalam upaya pengelolaanya tentu pemerintah desa yang menjadi penentu dalam setiap kegiatan-kegiatan pengelolaan. Dalam setiap kegiatan yang melakukan pengelolaan sepenuhnya adalah pemerintah desa namun jelasnya pemerintah desa juga mangajak masyarakat untuk terlibat dalam berbagai kegiatan yang menyangkut pengelolaan didesa. Pengelolaan desa dilakukan oleh pemerintah desa karena pemerintah desa yang paham mengenai kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan.

### **Pengorganisasian (*organizing*)**

pengorganisasian merupakan proses membagi kerja ke dalam tugas-tugas kecil, membebaskan tugas-tugas itu kepada orang sesuai dengan kemampuannya, dan mengalokasikan sumber daya, serta mengkoordinasikannya dalam rangka efektifitas pencapaian tujuan organisasi (syukran dkk, 2022).

Menurut George R. Terry (2006) "Pengorganisasian ialah penentuan, pengelompokkan, dan penyusunan macam - macam kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan, penempatan orang - orang (pegawai), terhadap kegiatan - kegiatan ini, penyediaan factor - faktor fisik yang cocok bagi keperluan kerja dan penunjukkan hubungan wewenang, yang dilimpahkan terhadap setiap orang dalam hubungannya dengan pelaksanaan setiap kegiatan yang diharapkan." (Sukarna, 2011).

Pendapat lain, menurut David H. Holt dalam (Wijono, 2018) pengorganisasian adalah fungsi mengumpulkan sumber daya, mengalokasikan sumber daya serta tugas penataan untuk memenuhi tugas organisasi. Beda halnya dengan yang di utarakan T. Hani Handoko (2016), menurut dia pengorganisasian yaitu proses dan kegiatan untuk: 1) penentuan sumber daya-sumber daya dan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi, 2) perancangan dan pengembangan suatu organisasi atau kelompok kerja yang dapat membawa hal-hal tersebut kearah tujuan, 3) penugasan tanggungjawab tertentu, dan 4) mendelegasikan wewenang yang diperlukan kepada individu-individu untuk melaksanakan tugastugasnya. Fungsi ini menciptakan struktur formal dimana pekerjaan ditetapkan, dibagi, dan dikoordinasikan.

Dalam konteks pengorganisasian pada suku bajo di Desa Balimu Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton penelliti menggunakan dua indikator untuk menilai sejauh mana pelaksanaan dalam aspek pengorganisasian. Indikator pertama yaitu adanya pendistribusian pekerja, kedua yaitu adanya tugas-tugas untuk mencapai tujuan. Dalam aspek pendistribusian pekerjaan di Desa Balimu Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton, peneliti menemukan bahwa kepala desa dalam memberikan pembagian pekerjaan dalam pengelolaan kepada masyarakat selalu melalui ketua RT dan para kepala dusun selanjutnya ketua RT dan para kepala dusun masing- masing yang memberi arahan arahan tersebut langsung kepada masyarakat kaitannya dalam kinerja yang akan dilakukan dalam upaya pengelolaan kawasan permukiman.

Selain itu dalam hal teknis, pendistribusian pekerjaan dilakukan oleh pemerintah desa dalam hal ini diwakili oleh ketua RT desa Balimu dan para kepala dusun yaitu dusun Cakalang dan dusun Turinga sesuai dengan arahan dari kepala desa selanjutnya masing-masing dari mereka akan menyampaikan langsung pembagian kerjanya sesuai dengan arahan-arahan yang ada. Dari hasil temuan di lapangan peneliti menyimpulkan pada aspek pendistribusian pekerjaan para aparat pemerintah desa tidak turun langsung melainkan hanya memeberi perintah kepada ke ketua RT dan para kepala dusun untuk menyampaikan arahan tersebut kepada masyarakat, arahan-arahan tersebut disampaikan apabila kegiatan yang dilakukan merupakan kegiatan yang bersumber dari pemerintah desa namun apabila kegiatan pengelolaan merupakan kegiatan dari pemerintah daerah maka hanya melibatkan aparatur desa.

Pada indikator kedua terkait dengan adanya tugas-tugas untuk mencapai tujuan, berdasarkan hasil wawancara bersama perangkat Desa peneliti menemukan tugas-tugas yang

diberikan diutamakan untuk para aparatur desa karena kegiatan pengelolaan didesa ini dilakukan oleh pemerintah desa meskipun tidak menutup kemungkinan masyarakat juga turut dilibatkan dalam tugas-tugas yang diberikan seperti menghimbau masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan laut di area permukiman. Mengenai tugas-tugas yang diberikan oleh kepala desa ketika adanya kegiatan-kegiatan dalam pengelolaan seperti halnya terdapat pembangunan didalam desa baik program kegiatan yang bersumber dari pemerintah desa maupun pembangunan yang bersumber dari pemerintah daerah tugasnya diarahkan langsung oleh kepala desa. Jika terdapat kegiatan pengelolaan didalam desa biasanya kami mendapat informasi dari kepala dusun jika kegiatan tersebut adalah pengelolaan dari desa maka masyarakat biasanya langsung terlibat seperti ikut membantu tetapi jika kegiatan pengelolaan seperti pembangunan desa dari pemerintah daerah biasanya masyarakat tidak dilibatkan karena tugas-tugas tersebut diarahkan untuk para pemerintah desa saja. Untuk tugas-tugas dalam pengelolaan kami membantu sesuai arahan saja dari kepala dusun kami. Selain itu berdasarkan hasil yang peneliti temukan di lapangan bahwa adanya tugas-tugas dalam pengelolaan dilakukan dengan pembagian pekerjaan kepada aparatur desa, kegiatan pengelolaan tersebut dilakukan ketika desa akan melakukan suatu pembangunan baik pembangunan dari perencanaan desa Balimu maupun pembangunan dari pemerintah daerah.

### **Pengarahan (*Actuating*)**

George R. Terry (2006), mengatakan bahwa yang dimaksud dengan pengarahan atau *actuating* adalah upaya membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar supaya berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan iklas serta sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan.

Dalam sebuah proses manajemen meskipun sudah memiliki perencanaan yang baik dan terstruktur, serta dibarengi dengan perencanaan yang matang tidak jarang apa yang direncanakan berpotensi tidak berjalan sebagaimana yang diinginkan, maka dari itu perencanaan yang baik dan matang tersebut mesti kiranya dibarengi dengan pengarahan yang baik. Dalam pengarahan pada pengelolaan kawasan pemukiman suku Bajo di Desa Balimu pada prosesnya mengukutsertakan sumber daya manusia dalam hal ini masyarakat secara bersama-sama dimana seorang pemimpin dalam hal ini adalah Kepala Desa mengarahkan serta menggerakkan seluruh bagian pada struktur dari sebuah organisasi dalam prosesnya sehingga apa yang kemudian menjadi tujuan dapat telaksana sesuai dengan yang diinginkan.

Usaha-usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut antara lain penimbunan laut, pembangunan jembatan dan jalan setapak dikawasan permukiman dalam penataan wilayah desa untuk mempermudah aktivitas masyarakat yang dilakukan secara bertahap sehingga saat ini sebagian besar kawasan permukiman suku bajo sudah tertimbun dan menjadikan desa ini layaknya desa yang berada di darat.

Dari fenomena yang peneliti temukan di atas terkait dengan aspek Pengarahan atau *Actuating* peneliti berkesimpulan bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan untuk tercapainya tujuan pengelolaan didesa Balimu adalah mengupayakan untuk melakukan penimbunan laut secara merata dikawasan permukiman suku bajo penimbunan ini dilakukan agar mempermudah pemerintah desa dalam melakukan pembangunan yang meliputi pengelolaan

desa dari segi sarana dan prasarana desa agar kondisi desa suku bajo sama seperti desa-desa didarat.

### Gambar 1.

Penimbunan Laut, Pembuatan Jalan Setapak dan Dermaga



Sumber: Dokumentasi Penulis, 2023

### Pengawasan (*controlling*)

*Cotrolling* atau yang disebut juga dengan pengawasan merupakan bagian penting dalam melihat apakah proses manajemen sudah berjalan dengan yang diharapkan dalam rangka mencapai tujuan sasaran ataupun sebaliknya. Menurut George R. Terry (2006) "Pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standard, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan bila mana perlu melakukan perbaikan - perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan standard (ukuran)".

Berdasarkan temuan yang didapati peneliti di lapangan terkait dengan aspek pengawasan yang dilakukan bahwa Dalam pengelolaan di desa Balimu dapat dikatakan berbagai kegiatan yang dilakukan sudah sesuai dengan rencana awal saat ini kita telah melihat bahwa masyarakat semakin mudah dalam beraktivitas, disamping itu kondisi desa Balimu saat ini juga sudah hampir sama dengan kondisi desa di darat karena adanya penimbunan laut beberapa sarana yang telah ada seperti akses jalan didalam desa, berdasarkan dapodik Dinas Pendidikan Kabupaten Buton tahun 2023 jumlah sekolah tersebar di Kecamatan Lasalimu sebanyak 52 Sekolah salah satunya terdapat di Desa Balimu yaitu sarana pendidikan Sekolah Dasar (SD), sarana kesehatan (pustu), dermaga dan kedepannya rencana pemerintah desa mengupayakan untuk pembangunan SMP agar semakin mempermudah anak-anak suku bajo di desa Balimu dalam menempuh pendidikan namun disamping itu yang menjadi kendala kami disini adalah belum tersedianya tempat penampungan sampah sehingga banyak masyarakat yang membuang sampahnya ke laut sampah masyarakat ini membuat beberapa lokasi didalam desa terlihat kumuh karena sampah yang dibuang bebas kelaut. Desa Balimu

dalam pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah desa sudah sesuai dengan apa yang diharapkan karena kondisi desa saat ini sudah sangat berkembang dan mengalami perubahan sejak pemekaran desa.

Selain itu berdasarkan hasil pengamatan peneliti menemukan bahwa tingkat keberhasilan dalam upaya pengelolaan desa cukup baik, tindakan yang dilakukan oleh pemerintah desa sesuai dengan RPJMDes, kondisi desa yang telah mengalami perubahan cukup signifikan dari berbagai aspek menjadikan desa Balimu semakin berkembang, walaupun dalam upaya pengelolaannya belum dapat dikatakan maksimal karena adanya beberapa faktor yang kurang diperhatikan seperti kurangnya kesadaran untuk menjaga kebersihan lingkungan laut masih banyak masyarakat yang membuang sampah kelaut sehingga membuat beberapa titik dikawasan permukiman terlihat kumuh selain itu melakukan aktivitas penimbunan terhadap kawasan mangrove yang menjadikan ekosistem mangrove memprihatinkan.

Dari beberapa hal mulai dari hasil wawancara sampai pada pengamatan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam pengelolaan permukiman di desa Balimu sudah sesuai dengan yang direncanakan meskipun sejauh ini keberhasilan dalam pengelolaan belum dapat dikatakan maksimal karena terdapat beberapa faktor yang menjadi tidak maksimalnya pemanfaatan di dalam desa seperti belum tersedianya tempat penampungan sampah sehingga sampah masyarakat dibuang secara bebas kelaut tanpa adanya himbuan atau larangan dari pihak manapun dengan adanya fenomena ini menjadikan beberapa lokasi dikawasan permukiman terlihat kumuh.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa; **pertama**, Pengelolaan kawasan permukiman di desa Balimu telah merusak ekosistem disekitarnya seperti kerusakan terhadap kawasan hutan mangrove akibat adanya penimbunan yang dilakukan secara terus-menerus. **Kedua**, Beberapa lokasi di dalam permukiman terlihat kumuh akibat tidak adanya tempat penampungan sampah sehingga masyarakat desa Balimu melakukan pembuangan sampah secara bebas kelaut. **Ketiga**, Dalam upaya pengelolaannya pemerintah desa selalu melibatkan partisipasi dari masyarakat agar adanya keterbukaan dan kejelasan dalam kegiatan di dalam desa. **Keempat**, Belum adanya pemanfaatan untuk mengolah sampah agar jumlah sampah yang dibuang kelaut dapat berkurang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Atmosudirdjo, P. (1982). *Kesekretarian dan administrasi perkantoran*. Ghalia Indonesia.
- Capalulu, M. A., Waani, J. O., & Rengkung, M. M. (2016). Perubahan Permukiman Suku Bajo Di Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara. *Spasial*, 3(1), 1-14.
- Fadli, M. R. (2021). *Memahami desain metode penelitian kualitatif*. Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum, 21(1)
- Handoko, T. Hani. (2003). *Manajemen*. Yogyakarta: BPPE.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2014. *Manajemen: Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Idrus, M. (2009). Kompetensi interpersonal siswa. *Unisia*, 32 (72).

- Moleong, L.J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nurkholis, A. (2018). *Mengenal Pusat Kebudayaan Maritim: Suku Bajo, Suku Bugis, Suku Buton, Suku Mandar di Segitiga Emas nusantara*.
- Sukarna. (2011). *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Terry. R. George. 2006. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: Sukarna.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1986. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: PT Gunung Agung.
- Supriati, E. (2017). Peran perpustakaan dalam meningkatkan mutu pendidikan di Universitas Muhammadiyah (UNMUH) Ponorogo. *Muslim Heritage: Jurnal Dialog Islam dengan Realitas*, 2(2).
- Suyuti N. (2011). *Orang Bajo di Tengah Perubahan*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Syahputra, R. D., & Aslami, N. (2023). Prinsip-Prinsip Utama Manajemen George R. Terry. *Manajemen Kreatif Jurnal*, 1(3).
- Syukran, M., Agustang, A., Idkhan, A. M., & Rifdan, R. (2022). Konsep organisasi dan pengorganisasian dalam perwujudan kepentingan manusia. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik*, 9(1), 95-103.
- Wijono, Sutarto. (2018). *Kepemimpinan Dalam Perspektif Organisasi*. Jakarta: Prenadamedia Group